

PENGUATAN BUMDES SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DI DESA BOJONG, KECAMATAN BANJARWANGI.

Apwa Pajrin¹, Nurhazar Indriani Putri², Siti Nur Fatonah³, Dewi Hanifah
Khairunnisa⁴, Tri Rahmadani⁵, Sapitri Yulia⁶, Rani Anggraeni⁷, Amelinda
Junita⁸, Aliya Nur'aeni⁹, Jajang Nugraha¹⁰, Nubal Ansori Abdullah¹¹, Ahmad
Rifai Sutansah¹², Daffa Pramawijaya¹³, Awalludin Firmansah¹⁴, Arif Budiman¹⁵,
Muhamad Zacky Mardyan¹⁶, Wildan Pratama¹⁷, Nurul Fatonah¹⁸, Dodi
Yudiardi¹⁹
Universitas Garut

e-mail: dodiyudiardi@uniga.ac.id, nurulfatonah@uniga.ac.id,
24012121056@uniga.ac.id, 24042121030@fmipa.uniga.ac.id,
24081121040@fkwu.uniga.ac.id, 24041121164@fmipa.uniga.ac.id,
24068122004@fpik.uniga.ac.id, ahmadrifaisutansah@gmail.com,
24071122070@fkominfo.uniga.ac.id, 24071122164@fkominfo.uniga.ac.id,
hnfddew@gmail.com, 24022221030@fekon.ac.id, jajangnug123@gmail.com,
24012122146@uniga.ac.id, 24041121159@fmipa.uniga.ac.id,
24022121098@fekon.ac.id, 24068122057@fpik.uniga.ac.id,
24012121085@uniga.ac.id, 24068122029@fpik.uniga.ac.id

ABSTRAK

Desa Bojong merupakan salah satu wilayah di kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Jawa Barat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, dilaksanakan dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi desa melalui program seminar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta pengurus BUMDes terkait manajemen usaha, pengelolaan sumber daya lokal, dan optimalisasi potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan langsung setelah seminar kepada pengurus BUMDes untuk pembuatan proposal usaha. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa dan tumbuhnya minat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan usaha desa. Diharapkan, dengan adanya seminar ini, BUMDes Desa Bojong dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: KKN, BUMDes, Pengembangan ekonomi desa

A. PENDAHULUAN

Desa di Indonesia telah lama menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bagi sebagian besar masyarakat. Meski demikian, banyak desa yang masih tertinggal dari segi ekonomi, terutama dalam hal pemanfaatan potensi lokal. Pembangunan ekonomi desa menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, mengingat potensi yang dimiliki oleh desa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional apabila dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan, salah satunya adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada desa dalam mengelola sumber daya dan aset desa secara mandiri guna mendorong pembangunan ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi entitas bisnis yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal desa secara maksimal, serta menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Selain itu, BUMDes juga memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada ekonomi luar desa, dan menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.

Meski memiliki tujuan yang mulia, pada kenyataannya banyak BUMDes yang belum mampu beroperasi secara optimal. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah rendahnya kapasitas pengelola dalam hal manajemen usaha, perencanaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi modern. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu atau dua desa, tetapi menjadi fenomena umum di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola BUMDes menjadi krusial agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi lokal.

Sistem pemerintah di Indonesia menganut asas desentralisasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional.

Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pembangunan sektor ekonomi dimasyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah pusat mengharapkan pemerintah desa untuk lebih mandiri didalam mengelola keuangan desanya. Untuk itu harus ada inisiatif, peran aktif dan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri untuk membangun dan mendirikan kelembagaan yang sistematis yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu sumber PADes (Nining Asniar Ridzal, 2020). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 juga telah secara jelas menyebutkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUMDes sendiri menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hingga saat ini jumlah BUMDes kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 misalnya, kementerian desa mencatat

bahwa 61% dari seluruh desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Persentase tersebut adalah hasil peningkatan dari tahun 2014 dimana jumlah BUMDes hanya ada sebanyak 1.022 unit, yang meningkat menjadi 45.549 unit pada tahun 2018. Bersamaan dengan hal tersebut, lebih dari satu juta tenaga kerja telah terserap oleh BUMDes (Sidik, 2020).

Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Menurut Abdul Rohman dkk (2018), Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya pengelolaan BUMDes, baik operasional maupun pengembangan bentuk usaha pada BUMDes, faktor utama adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, kurangnya sosialisasi dan pembelajaran, pendampingan dan fungsi pemerintah daerah dalam rencana pengembangan BUMDes, serta pemahaman masyarakat yang masih homogen sehingga mengakibatkan minimnya daya cipta masyarakat dalam mengembangkan potensi desa tersebut untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit desa.

Desa di Indonesia telah lama menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bagi sebagian besar masyarakat. Meski demikian, banyak desa yang masih tertinggal dari segi ekonomi, terutama dalam hal pemanfaatan potensi lokal. Pembangunan ekonomi desa menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, mengingat potensi yang dimiliki oleh desa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional apabila dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan, salah satunya adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada desa dalam

mengelola sumber daya dan aset desa secara mandiri guna mendorong pembangunan ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi entitas bisnis yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal desa secara maksimal, serta menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Selain itu, BUMDes juga memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada ekonomi luar desa, dan menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.

Meski memiliki tujuan yang mulia, pada kenyataannya banyak BUMDes yang belum mampu beroperasi secara optimal. Kendala yang sering dihadapi antara lain adalah rendahnya kapasitas pengelola dalam hal manajemen usaha, perencanaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi modern. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu atau dua desa, tetapi menjadi fenomena umum di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola BUMDes menjadi krusial agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pemberdayaan desa melalui BUMDes tidak dapat dipisahkan dari kompetensi sumber daya manusia yang ada di desa, khususnya pengelola BUMDes. Pengelola yang memiliki keterampilan manajerial yang baik akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis, terutama dalam lingkungan desa yang sering kali kurang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi. Sebaliknya, jika pengelola BUMDes tidak memiliki kompetensi yang memadai, BUMDes rentan mengalami kegagalan dan justru menjadi beban bagi desa itu sendiri.

Penguatan kapasitas pengelola BUMDes merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kapasitas yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga kemampuan dalam melakukan inovasi. Dengan kapasitas yang memadai, pengelola BUMDes diharapkan mampu merumuskan dan menjalankan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan BUMDes. Pengelola BUMDes perlu dibekali dengan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, memperbaiki manajemen internal, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transformasi digital, termasuk di tingkat desa.

Seminar yang diselenggarakan di Desa Bojong, Kecamatan

Banjarwangi, ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperkuat kapasitas pengelola BUMDes di tingkat lokal. Seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengelola BUMDes tentang strategi pengelolaan bisnis yang efektif dan berkelanjutan, serta cara-cara untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha desa.

Desa Bojong merupakan salah satu desa di Kecamatan Banjarwangi yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, perkebunan, dan produk olahan hasil alam. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa, terutama melalui BUMDes. Hingga saat ini, BUMDes di Desa Bojong masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan pengelola tentang manajemen usaha, hingga minimnya akses pasar untuk memasarkan produk unggulan desa.

BUMDes Desa Bojong saat ini belum berjalan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Produk-produk unggulan BUMDes Bojong masih terbatas pada pasar lokal, sementara peluang untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas belum dioptimalkan.

Selain itu, keterbatasan pengetahuan dalam hal manajemen keuangan juga menjadi kendala bagi pengelola BUMDes di Desa Bojong. Banyak pengelola yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga pengelolaan keuangan BUMDes sering kali tidak terstruktur dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui seminar ini, diharapkan pengelola BUMDes di Desa Bojong dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Seminar ini akan membahas berbagai topik penting, seperti pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, strategi pemasaran berbasis digital, dan transparansi dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, BUMDes Bojong diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi desa.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Seminar Penguatan BUMDes di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sistematis untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga masyarakat Desa Bojong yang terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMDes, ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna dengan total peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan dan manajemen BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes.
2. Masyarakat memahami peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu bulan, meliputi beberapa tahapan penting yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap awal, perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan terkait pengelolaan BUMDes di Desa Bojong. Proses ini mencakup langkah-langkah berikut:

- Pertemuan dengan Kepala Desa Bojong

Koordinasi dengan kepala desa dilakukan untuk menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan izin resmi untuk menyelenggarakan seminar. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam kondisi BUMDes saat ini dan mendapatkan masukan dari pihak desa terkait fokus materi yang perlu disampaikan dalam seminar.

- Meminta Izin dan Mengundang Pemateri

Izin diberikan oleh Bapak Dr. Dodi Yudiardi, M.Si untuk menjadi narasumber dalam seminar ini. Beliau merupakan ahli dalam bidang ekonomi desa dan pengembangan usaha desa yang diharapkan mampu memberikan wawasan praktis dan relevan bagi masyarakat dan pengelola BUMDes.

- Menyiapkan Bahan Seminar

Bahan seminar disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelola BUMDes di Desa Bojong. Materi yang akan disampaikan mencakup pengelolaan dan manajemen BUMDes, strategi pemasaran produk, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Seminar ini dilaksanakan di balai desa dengan metode yang partisipatif,

di mana setiap peserta berperan aktif dalam sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sesi sebagai berikut:

- Presentasi Narasumber

Dalam sesi ini, pemateri akan menyampaikan materi inti mengenai pengelolaan BUMDes secara komprehensif, mulai dari aspek manajemen, keuangan, hingga pemasaran. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengelola dan masyarakat tentang pentingnya peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Narasumber juga akan membahas contoh-contoh kasus sukses dari BUMDes di daerah lain yang dapat dijadikan inspirasi.

- Diskusi Kelompok

Setelah presentasi narasumber, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMDes Desa Bojong. Kelompok ini mencakup pengelola BUMDes, perangkat desa, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK yang aktif dalam kegiatan ekonomi di desa. Diskusi ini akan difasilitasi oleh tim pengabdian untuk memastikan bahwa setiap masalah diidentifikasi secara jelas, dan solusi-solusi praktis dapat diusulkan.

- Metode Diskusi Terbuka dengan Masyarakat

Selain diskusi kelompok, sesi diskusi terbuka antara masyarakat dan perangkat desa diadakan untuk membahas faktor-faktor yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan BUMDes. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi minimnya keterampilan manajemen, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta rendahnya transparansi keuangan. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan akan muncul solusi yang dapat langsung diaplikasikan untuk memperbaiki kinerja BUMDes di Desa Bojong.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan

3. Monitoring dan Pendampingan

Setelah seminar selesai, tim pengabdian melanjutkan kegiatan dengan melakukan monitoring dan pendampingan secara intensif kepada pengelola BUMDes. Pendampingan ini dilakukan selama satu bulan, dengan fokus pada penerapan ilmu dan keterampilan yang didapatkan dari seminar.

4. Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Evaluasi dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai dampak kegiatan.

Evaluasi dilakukan Analisis Performa BUMDes Tim pengabdian melakukan analisis terhadap perkembangan performa BUMDes pasca-seminar, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes yang dilaksanakan di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, merupakan salah satu tahapan krusial dalam rangkaian program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Garut 2024. Seminar ini berlangsung pada tanggal 30 Juli hingga 31 Agustus 2024 di Aula Balai Desa Bojong yang beralamat di Kampung Tanjungsari, RT.03/RW.01, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, dengan kode pos 44172.

Kerja sama antara tim KKN dan masyarakat desa menjadi pondasi utama terlaksananya seminar ini. Adapun seminar tersebut merupakan salah satu implementasi program kerja utama yang berfokus pada penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat Desa Bojong, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok-kelompok sosial yang aktif di desa.

Sambutan pembukaan seminar disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bojong, yang memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini serta menyampaikan harapan agar hasil seminar dapat memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan BUMDes di Desa Bojong. Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMDes dengan masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengelolaan yang profesional dan transparan.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, antara lain Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojong, seluruh RT dan RW, anggota Karang Taruna, pengelola BUMDes, serta ibu-ibu PKK. Kehadiran mereka mencerminkan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang pengelolaan BUMDes yang efektif dan efisien.

Pemateri utama dalam seminar ini adalah Dr. Dodi Yudiardi, M.Si, yang merupakan akademisi sekaligus dosen di Universitas Garut, dengan spesialisasi dalam bidang pengelolaan ekonomi desa. Pemaparan materi yang diberikan oleh beliau sangat relevan dengan konteks BUMDes di Desa Bojong. Beliau menyoroti pentingnya peran masyarakat, terutama generasi muda, dalam mendukung pengelolaan BUMDes. Generasi muda desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan BUMDes agar mampu bersaing dan tetap eksis di tengah tantangan perekonomian global.

Materi yang disampaikan Dr. Dodi meliputi berbagai aspek penting dalam pengelolaan BUMDes, antara lain:

Manajemen Pengelolaan BUMDes: Pengelola BUMDes harus memahami prinsip-prinsip manajemen usaha yang baik, mulai dari perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran. Dengan manajemen yang baik, BUMDes dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam setiap kegiatan usaha, terutama BUMDes yang dikelola oleh masyarakat, aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, serta meminimalisir potensi konflik internal.

Peran Teknologi dalam Pengelolaan BUMDes: Di era digital seperti saat ini, pengelola BUMDes harus mampu memanfaatkan teknologi untuk

mengembangkan usahanya. Teknologi dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk unggulan desa melalui platform digital, mengelola data keuangan secara lebih efisien, serta memperluas jangkauan pasar.

Inovasi Produk dan Layanan: Salah satu kunci sukses dalam pengelolaan BUMDes adalah kemampuan untuk berinovasi, baik dalam produk maupun layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Inovasi ini harus didasarkan pada potensi lokal desa serta kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri, terutama terkait bagaimana peran masyarakat secara langsung dalam pengelolaan BUMDes. Beberapa peserta juga menanyakan mengenai cara-cara meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes, serta strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh BUMDes untuk memperluas pasar produk unggulan desa, seperti produk pertanian alpukat yang menjadi salah satu komoditas potensial di Desa Bojong.

Salah satu luaran yang diharapkan dari kegiatan seminar ini adalah peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengelola usaha dengan lebih profesional dan transparan. Selain itu, pengelola BUMDes di Desa Bojong diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya generasi muda, dalam berbagai aspek pengelolaan, baik dari sisi manajemen, pemasaran, hingga inovasi produk.

Luaran konkret lainnya adalah pembuatan proposal pengajuan dana BUMDes yang difokuskan pada pengembangan produk alpukat melalui budidaya alpukat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan potensi lokal Desa Bojong yang memiliki lahan pertanian subur dan iklim yang mendukung untuk budidaya alpukat.

Seminar ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Pemaparan materi dilakukan dengan menggunakan media elektronik, seperti laptop dan proyektor (infokus), yang memudahkan penyampaian materi secara visual kepada peserta. Setiap materi yang disampaikan juga diiringi dengan contoh-contoh konkret yang relevan dengan konteks pengelolaan BUMDes di Desa Bojong.

Setelah sesi ceramah, dilakukan diskusi kelompok yang melibatkan pengelola BUMDes dan masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi BUMDes serta mencari solusi bersama. Salah satu isu yang dibahas dalam diskusi adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, masalah dalam pemasaran produk unggulan desa juga menjadi fokus diskusi, di mana masyarakat menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi

digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, kegiatan seminar juga dirancang untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam pengelolaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat turut serta dalam upaya membangun kemandirian ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara keseluruhan.

Banyaknya potensi yang dimiliki Desa Bojong antara lain: objek parawisata, bahan-bahan seperti kayu, bambu, pasir, dan batu, sumber air dengan 18 sumber mata air, 565 buah sumur dan 8 sungai, ada beberapa ternah seperti kerbau, sapi, domba, ayam dan lain lain, lalu dari produksi pertaniannya ada 162,5 ton/tahun padi, 0,5 ton/tahun buah-buahan yang dapat dimanfaatkan guna pengembangan usaha BUMDes. Adapun komoditas yang ada di Desa Bojong sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis Komodita dan Lahan di Desa Bojong

No	Jenis Komoditas	Produksi Pertanian		Keterangan
		Lahan Basah (Kg/Ha)	Lahan Kering (Kg/Ha)	
1.	Padi	162,5		
2.	Ubi Jalar		10.000	
3.	Ubi Kayu		10.000	
4.	Teh	5.000		
5.	Jagung	100		
6.	Pisang	3.000		
7.	Alpukat		-	
8.	Kopi	300		
9.	Manggis		1.000	
10.	Ikan Kolam	600		

Yang mana potensi ini bisa dikembangkan bersama melalui BUMDes oleh pemerintah Desa Bojong dan masyarakat secara bersama-sama sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Bojong Banjarwangi Kabupaten Garut. Materi seminar antara lain mengenai pemahaman apa yang dimaksud dengan BUMDes dan bagaimana mengelola BUMDes, mengapa perlu kelembagaan BUMDes, apa saja peranan BUMDes, apa tujuan pendirian BUMDes, BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dan bagaimana organisasi dan tata kepengurusan BUMDes. Dalam kegiatan masyarakat sangat antusias dan memahami tentang materi yang dipaparkan dan ingin mengaplikasikannya di BUMDes “SEGAR TANI” Desa Bojong. Namun untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal kegiatan seperti ini atau

sejenisnya harus selalu dilakukan sebagai kegiatan pendampingan masyarakat sehingga mereka mampu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan BUMDes secara maksimal agar tercipta desa yang mandiri dan sejahtera melalui BUMDes.

D. KESIMPULAN

Kegiatan seminar Penguatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojong sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, masyarakat sangat bersemangat dalam diskusi dan berkeinginan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan BUMDes sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa Bojong agar menjadi desa yang mandiri dengan memanfaatkan potensi desa melalui BUMDes. Kegiatan seperti ini ataupun sejenisnya hendaknya dilakukan secara berkesinambungan sebagai wujud pengembangan desa bagi pemerintah desa dan bentuk pengabdian masyarakat melalui pendampingan oleh pemateri seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nining Asniar Ridzal, W. A. (2020). EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.
- Sidik, H. (2020). MENINGKATKAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI PEDESAAN DI DESA LANGGENSARI. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2.
- Agung, L. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus di Desa Ngadirejo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 45-56.
- Eko, Y., & Asnawi, I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 87-95.
- Herlina, S., & Purnomo, H. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 15-25.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Panduan Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Sukoco, A., & Susilowati, N. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 23-31.
- Sutoro Eko. (2018). *BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Desa: Pengalaman dan Tantangan di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"